

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Nurfadilah Aris

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : nurfadilah_aris@yahoo.com

Sri Astuty

Pembimbing I

Email : sridede98@gmail.com

Andi Samsir

Pembimbing II

Email : syamsir_fe03unm@yahoo.co.id

ABSTRAK

Nurfadilah Aris, Sri Astuty, dan Andi Samsir (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2013-2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus signifikan memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

The Effect Of Balanced Fund towards Economic Growth 3 City in South Sulawesi

Nurfadilah Aris

Development Economic Study Program Economic Faculty State University of Makassar

Email : nurfadilah_aris@yahoo.com

Sri Astuty

Mentor I

Email : sridede98@gmail.com

Andi Samsir

Mentor II

Email : syamsir_fe03unm@yahoo.co.id

ABSTRACT

Nurfadilah Aris, Sri Astuty, and Andi Samsir (2019) The Effect of Balanced Fund Economic Growth 3 City in South Sulawesi. Development Economics Study Program.Faculty of Economics, University of Makassar.

The purpose of this research is to identity the effect of general allocation fund, specific allocation fund, and profit sharing fund towards economic growth 3 city in South Sulawesi. This research use multiple regression analysis tools by using E-views 10, and using secondary data from 2013-2017.

The result of this research indicate that simultaneously variables of general allocation fund, specific allocation fund, and profit sharing fund simultaneously influence economic growth 3 city in South Sulawesi. Partially show general allocation fund and specific allocation fund significantly effect economic growth 3 city in South Sulawesi and while profit sharing fund has no significant effect towards economic growth in South Sulawesi.

Keywords: Economic Growth, General Allocation Fund, Spesific Allocation Fund, Profit Sharing fund.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan menggali dan mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurut Sun'an dan Senuk (2015) Pembangunan daerah menekankan prasyarat kepada pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama masyarakatnya dalam rangka menemukan daya-upaya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan pula.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yang mana keduanya memiliki hubungan erat sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan beberapa sektor di setiap kabupaten/kota sangat beragam tergantung dari karakteristik sektor yang ada di kabupaten atau kotatersebut.

Dapat diketahui bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan di mana merupakan output dari jumlah PDRB masih terjadi kesenjangan antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya.

Pertumbuhan PDRB paling tinggi terdapat di Kota Makassar mencapai 103,85 miliar rupiah pada tahun 2017. Sedangkan pertumbuhan perekonomian yang paling rendah terletak di Kepulauan Selayar yaitu 3,14 miliar rupiah. Meskipun dalam lima tahun terakhir PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Kota Makassar, tetapi jumlah PDRB setiap Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun, jumlah PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota ini setiap tahunnya selalu meningkat tetapi hal sebaliknya jika dilihat laju pertumbuhannya, di mana laju pertumbuhan PDRB setiap tahunnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami fluktuatif yang artinya meskipun pada tahun sebelumnya terjadi kenaikan tetapi pada tahun berikutnya terjadi penurunan.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan periode 2013-2017 cenderung berfluktuatif. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 7 persen. Dapat dilihat dari gambar di atas, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yaitu sebesar 7,72%. Meskipun demikian, hanya beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan memiliki nilai di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan di mana sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan masih menjadi sektor dengan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota adalah masing-masing daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Menurut Budi dan Dewi (2015) Pemerintah daerah memacu angka pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya yang potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama pada masyarakat guna memperluas kesempatan kerja. Pembangunan aset tetap di bidang infrastruktur, jalan raya, bandara, sistem saluran air, dan lainnya sarana publik sangat berkontribusi besar terhadap tingkat produktivitas.

Dalam era otonomi masing-masing daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna kemakmuran masyarakatnya. Menurut Saragih (2003) Melalui otonomi daerah, pembangunan daerah yang dilakukan masyarakat lokal merupakan strategi yang paling efektif dibandingkan strategi pembangunan yang bersifat sentralistik yang dilakukan pusat. Namun, dalam menjalankan desentralisasi, pemerintah daerah biasanya mengalami kekurangan dalam APBD. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya penerimaan daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dengan adanya otonomi maka desentralisasi pun terjadi, baik yang menyangkut perencanaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan lainnya. Dari segi pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan

agar pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan daerah tersebut. Salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam hubungannya dengan kebijakan keuangan adalah desentralisasi fiskal untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan dorongan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Oleh karena itu desentralisasi fiskal harus menuntun kepada alokasi sumber-sumber daya yang lebih efisien dan diharapkan secara positif dapat dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam PDB per kapita yang sebenarnya sebagai suatu keseluruhan (Sun'an dan Senuk, 2015).

Melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan momentum yang sangat baik bagi setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan dalam segala aspek, termasuk pembangunan ekonominya. Dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) diharapkan dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya membangun daerah. Tujuan hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) dilandasi oleh prinsip kategori keadilan yang menyatakan bahwa seluruh warga negara dimanapun berada berhak mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan pada standar minimum tertentu. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada umumnya diperuntukkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan daerah yang merupakan prioritas nasional untuk mendorong tercapainya standar pelayanan minimum pada urusan publik yang menjadi prioritas nasional misalkan dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang urusannya telah didesentralisasikan ke daerah (dsfindonesia, 2010). Menurut Pasal 23 UU 33/2004 DBH pembagiannya dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*. Maksudnya penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Jenis-jenis DBH meliputi DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak penghasilan dan Cukai Hasi Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Perkembangan dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan laju pertumbuhan dari tahun 2012-2017. Di mana dana alokasi khusus mengalami tren peningkatan selama periode 2012-2017. Pada tahun 2015 ke 2016 dana alokasi khusus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sisi jumlah dana alokasi khusus lebih besar daripada dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Namun, dalam tahun yang sama laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2014 ke 2015 mengalami perlambatan sebesar 0,37% begitu pula pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,18%.

Dari data yang diambil, fenomena tersebut belum memperlihatkan efektifitas dalam menggunakan pendapatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai Teori Keynesian yang menyatakan bahwa ketika pendapatan meningkatkan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan (Mankiw, 2007). Sejak desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia, sumber dan pembangunan daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat. Dalam hal ini di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dapat dikatakan bahwa porsi anggarannya perimbangan yang diberikan tiap tahunnya cenderung meningkat. Namun, belum dialokasikan dengan baik yang justru nantinya akan menciptakan ketidakefisienan dan pemborosan terhadap dana tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan dimensi waktu, yaitu data *time-series* (runtutan waktu). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data serta dipublikasikan pada masyarakat pengguna data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPk).

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan digambarkan dalam laju pertumbuhan PDRB tahun 2013-2017 dalam satuan persen.
2. Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengantisipasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Data yang digunakan yaitu Dana Alokasi Umum melalui website Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2013-2017 dalam satuan juta rupiah.
3. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data yang digunakan yaitu Dana Alokasi Khusus dalam website Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2013-2017 dalam satuan juta rupiah.
4. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, dalam hal ini Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana

Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Tujuan utama DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Data yang digunakan yaitu Dana Bagi Hasil dalam website Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2013-2017 dalam satuan juta rupiah.

Metode Analisis Data

Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan persamaan model analisis regresi yaitu sebagai berikut:

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{AU_{it}} + \beta_2 D_{AK_{it}} + \beta_3 D_{DBH_{it}} + \beta_4 DmPR_i + \beta_5 DmMKS_i + \mu_{it}$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

β_0 = *Intercept*/ Bilangan Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_5$ = Koefisien regresi variabel bebas

Dummy perbedaan wilayah

DmPare-pare = 1, untuk wilayah Pare-pare

0, untuk lainnya

DmMakassar = 1, untuk wilayah Makassar

0, untuk wilayah lainnya

μ = Gangguan (Error)

i = *cross section*

t = *time series*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya akan dilakukan analisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengaitkan terhadap teori-teori ekonomi yang melandasi dan penelitian yang terkait sebelumnya.

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAU tidak sesuai hipotesis penelitian. Ditunjukkan dengan nilai koefisien -0,68 yang

berarti bahwa apabila DAU meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,68 persen. Ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,0132 < = 0,1$. Hasil penelitian ini sesuai dengan peran DAU sebagai *general purpose grant*, yaitu pendapatan umum bagi pemerintah daerah yang dapat di kategorikan sebagai *unconditional grant* di mana dana yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun oleh pemerintah pusat.

Untuk Kota Makassar hasil penelitian di atas sesuai dengan data pertumbuhan ekonomi dan realisasi Dana Alokasi Umum pada periode 2013-2017. DAU Kota Makassar terus mengalami peningkatan bahkan merupakan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga memiliki proporsi yang paling besar terhadap penerimaan Kota Makassar sepanjang periode tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya, berbeda dengan Kota Makassar, untuk Kota Parepare hasil penelitian ini tidak sesuai dengan data pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum di periode yang sama. DAU Kota Parepare merupakan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan serta pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sepanjang periode tersebut. Selain itu, untuk Kota Palopo hasil penelitian di atas juga sesuai dengan data realisasi DAU Kota Palopo. Data tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017 DAU Kota Palopo mengalami peningkatan signifikan. Berbeda dengan DAU, data pertumbuhan ekonomi Kota Palopo menunjukkan bahwa sepanjang periode tersebut cenderung mengalami penurunan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Ida Ayu Putu Mega et.al (2014) bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi, hal ini sejalan dengan laporan penelitian dana transfer pusat ke daerah (2010) dengan adanya Alokasi Dasar dalam formula DAU saat ini yang dihitung dari kebutuhan belanja pegawai daerah tentunya akan menjadi insentif bagi daerah untuk mengusulkan pengangkatan jumlah pegawai sebanyak-banyaknya. Penambahan jumlah pegawai negeri sipil daerah yang tidak rasional dan melebihi pertumbuhan DAU menyebabkan sebagian besar DAU akan terserap untuk keperluan belanja pegawai tersebut. Tidak bisa dihindari bahwa adanya anggaran dasar dalam formula DAU menimbulkan kesan bahwa DAU memang diperuntukkan membayar gaji bukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan dan investasi. Selain itu hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan bahwa model dasar dari penentuan pendapatan. Perpotongan Keynesian menganggap kebijakan fiskal dan investasi yang direncanakan sebagai variabel eksogen dan menunjukkan adanya satu tingkat pendapatan nasional di mana pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perpotongan Keynesian menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DAK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian dalam variabel DAK berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,219 dengan signifikansi 0,072. Hal ini berarti bahwa apabila DAK meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,219 persen. Ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,072 < \alpha = 0,1$.

Untuk Kota Makassar hasil penelitian di atas sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Khusus pada periode 2013-2017. DAK Kota Makassar terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 dan merupakan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan salah satunya dengan terus meningkatnya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. DAK Selanjutnya, untuk Kota Parepare dan Kota Palopo meskipun alokasi DAK berfluktuasi namun DAK tersebut mampu meningkatkan infrastruktur. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Zulfa Eliza et.al (2014) bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap PDRB. Tetapi hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah perkembangan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut Rostow mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

c. Pengaruh Kurs terhadap Impor

DBH tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,12 > \alpha = 0,1$ dengan nilai koefisien variabel DBH sebesar 1,94 persen. Artinya berapapun kenaikan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena realisasi DBH yang diterima secara keseluruhan kurang berkontribusi untuk pembangunan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Jika ada penggunaan DBH untuk peningkatan daerah itu hanya sebagian kecil dan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk Kota Makassar hasil penelitian di atas tidak sesuai dengan data realisasi Dana Bagi Hasil pada periode 2013-2017. DBH untuk Kota Makassar dialokasikan berdasarkan *prinsip by origin*, di mana Kota Makassar merupakan penghasil penerimaan Negara sehingga mendapatkan bagian atau persentase yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. DBH Kota Makassar merupakan alokasi terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan pada periode tersebut. Selanjutnya, untuk Kota Parepare dan Kota Palopo sesuai dengan data

realisasi dana bagi hasil yang ada di kedua Kota tersebut yang dialokasikan berdasarkan pemerataan. Sepanjang periode tersebut DBH Kota Parepare dan Kota Palopo memiliki proporsi yang rendah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah perkembangan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dummy perbandingan wilayah memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo secara signifikan. Dana Bagi Hasil (DBH) memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo pada tahun 2013-2017 secara tidak signifikan

REFERENSI

- Arifandi, M. (2016). *Pengaruh PAD dan Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2016*. Skripsi. Universitas Hasanuddin
- Ayu, Putu Mega Rosita, & I Ketut S. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*.
- Badan pusat statistik. (2016). *Statistik Indonesia Dalam Angka*, Makassar : BPS
- Chandra. D. dkk. (2017). *Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol 12. No.2.
- Dewi, N.W., & Budhi, M. K (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali*. E-jurnal EP Unud, 1391-1420.
- Gujarati, Damodar. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, M. (2016). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, edisi 3*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Lucky, D. (2011). *Analisis Pengaruh Variabel Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Mankiw, N George (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 44-45.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Telaah Bisnis*. 2541-6790.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro, edisi revisi*. Bandung. Refika Aditama.
- Nanga, M. (2001) *Makroekonomi : Teori Masalah dan Kebijakan*, Edisi Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Putri, Z.E. (2015). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 174-186.

- Pramandari, Y.P., & Kaluge, D. (2017). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.24-34
- Rahim, Abdul. (2012). *Model Ekonometrika Perikanan Tangkap*. Jakarta: Badan Penerbit Univerisitas Negeri Makassar.
- Rosita, I.A.P.M., & Sutrisna, I. K. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupatn/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud. 1145-1471.
- Saraswati, D. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Dearah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Provisi Sumatera Utara*. Vol.8. No.1.
- Sudirman, I. W. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Sun'an, M. & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sun'an, M (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wau, T., & Fau. J. F. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 83-100.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: Ekonosia.
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, edisi revisi*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Zulfa, E., Said M., & Muhammad N. (2014). *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh*.